



**KAJIAN KELEMBAGAAN SANITASI DENGAN PENDEKATAN
KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN PERDESAAN
SEHAT DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

***INSTUTIONAL STUDY OF SANITATION BY A PARTNERSHIP APPROACH
IN DEVELOPMENT ACTIVITIES OF PERDESAAN SEHAT IN THE
DISTRICT SIJUNJUNG***

Oktariyani Dasril
Stikes Syedza Saintika Padang

ABSTRAK

Permasalahan sanitasi di Kabupaten Sijunjung merupakan permasalahan prioritas, dimana pada tahun 2014 hanya 63,4% masyarakat memiliki akses jamban yang sehat, sedangkan target jamban sehat 75%. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menjalankan kebijakan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat diantaranya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu jenis kegiatan pemerintah adalah kegiatan perdesaan sehat di bawah kordinasi Deputy Sumber Daya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana kebijakan perdesaan sehat ini diarahkan pada percepatan pembangunan kualitas kesehatan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas lembaga dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar di perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi atas keberadaan kelembagaan sanitasi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal yang dilihat dari pendekatan kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan forum masyarakat di tingkat kabupaten serta menggunakan metode diskusi kelompok dengan pemerintahan nagari, tokoh masyarakat dan anggota pokja di tingkat nagari. Hasil penelitian ini menggambarkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat melalui pendekatan kemitraan di tingkat kabupaten sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Namun di tingkat nagari peranan kelembagaan masyarakat ini belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pendekatan kemitraan. Berdasarkan hal tersebut diperlukannya peningkatan pembinaan dari kabupaten kepada nagari melalui kerjasama dengan forum kabupaten sehat untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pokja nagari serta diperlukannya penguatan kelembagaan di tingkat nagari baik oleh pemerintahan nagari itu sendiri maupun oleh pemerintahan kabupaten agar peran dan fungsi kelembagaan masyarakat di nagari dapat berjalan optimal di masyarakat.

Kata Kunci : Kelembagaan, Sanitasi, Perdesaan Sehat



ABSTRACT

Sanitation problems in Sijunjung is a priority issues, where in 2014 only 63.4% of people have access to latrines healthy, whereas the target of about 75% of healthy latrines. To overcome these problems a government run public participation by using community participation approach include increasing institutional capacity of local governments and communities. One of the government's policy is Perdesaan Sehat activities under the coordination of the Deputy Ministry of Rural Resources, of Rural Development and Transmigration. Where healthy rural policy is directed at accelerating the development of health quality, which is based on increasing the capacity of institutions and infrastructure of basic health services in rural areas. The purpose of this study was to determine the role and function of the existence of institutional sanitation to increasing empowerment activities in area of health development as seen from a partnership approach. This study used a qualitative approach using in-depth interviews with informants consisting of related local government offices and public forums at the district level as well as using focus group discussions with village government, community leaders and members of the working group at the level of villages. Results of this study describes the role and functions of public institutions through a partnership approach at the district level has been running well in accordance with their respective roles. But in village level institutional role this community has not run as expected, either through a partnership approach. Based on the need for an increase in coaching from districts to villages through cooperation with forums districts healthy for dissemination and training to working group villages as well as the need for institutional strengthening at the level of villages either by village government itself or by the district administration so that the roles and functions of community institutions in villages can run optimally in society.

Keywords : Institutional, Sanitation, Perdesaan Sehat

PENDAHULUAN

Permasalahan sanitasi merupakan masalah yang melibatkan beberapa faktor antara lain: masyarakat sebagai pelaku penghasil sampah, teknologi dan manajemen pengelolaan sanitasi yang masing-masing saling mempengaruhi dan kepedulian baik berupa keputusan ataupun kebijakan dari pemerintahan dalam menangani permasalahan air bersih dan sanitasi (Depkes RI, 2004).

Ketidakefektifan pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan di wilayah perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti rusaknya infrastruktur air bersih, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perawatan sarana air bersih, belum efektifnya organisasi pengelola air bersih dan minimnya pengetahuan dan pola

perilaku masyarakat yang kurang sehat seperti buang air besar sembarang tempat, menggunakan air sungai sebagai sarana MCK dan tingginya penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih dan sanitasi (Bappenas, 2010).

Oleh karena itu program yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam program terutama dalam hal pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana yang sudah terbangun. Salah satu jenis kegiatan yaitu Perdesaan Sehat yang dilaksanakan di bawah koordinasi Deputi Sumber Daya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Kegiatan perdesaan sehat ini difokuskan kepada daerah-daerah tertinggal dengan tujuan untuk



meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah tertinggal (KPDT RI, 2013).

Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu minimnya kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta lemahnya kelembagaan kemasyarakatan seperti organisasi koperasi yang berbasis masyarakat. Selain itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mendorong kelembagaan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya (Bappeda Sijunjung, 2011).

Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten yang pertama kali mengeluarkan Peraturan Bupati mengenai Pengembangan Perdesaan Sehat di Kabupaten Sijunjung dimana didalamnya disebutkan adanya Forum Multi Stakeholder yang merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan perdesaan sehat.

Data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2014 hanya 63,4 persen masyarakat yang memiliki akses sanitasi yang baik dan ini berkurang dari tahun 2013 yaitu 75,5 persen (Dinkes Sijunjung, 2014). Berkurangnya akses sanitasi di masyarakat ini disebabkan karena rusak dan tidak berfungsinya sarana sanitasi yang telah ada, sehingga masyarakat kembali pada kebiasaan lama buang air besar disembarang tempat terutama di sungai (Dinkes Sijunjung 2014). Melihat pentingnya peran dan fungsi kelembagaan

sebagai media pengembangan masyarakat guna mengelola sanitasi dengan pendekatan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga memunculkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan sanitasi di masyarakat terutama didaerah tertinggal.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait kelembagaan dengan tokoh masyarakat dalam perbaikan kondisi sanitasi masyarakat di daerah tertinggal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, Nagari Padang Tarok dan Nagari Unggan. Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap mengetahui masalah secara lebih mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam secara individu (*Individual In-depth Interview*), maupun kelompok (*Group Interview*), daftar telaah dokumen, catatan lapangan serta tape recorder. Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang yang terlibat dengan kelembagaan sanitasi di kabupaten, sedangkan untuk FGD di nagari terdiri dari perangkat nagari serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam sanitasi di masyarakat.



HASIL

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Informan yang memberikan informasi melalui wawancara mendalam sebanyak 8 orang, terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung, Kepala Bidang Perencanaan Program Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sijunjung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kepala

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kepala Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, dan Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Sijunjung. Pada Tabel 1 dijelaskan karakteristik responden yang digunakan pada saat wawancara mendalam.

Tabel 1. Karakteristik Informan yang Dilakukan Wawancara Mendalam

Kode	JK	Jabatan	Umur	Pendidikan Terakhir
1	L	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	46	S2
2	L	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	51	S1
3	P	Kepala Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	47	S1
4	P	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	43	S1
5	L	Kepala Bidang Perencanaan Program Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sijunjung	52	S1
6	L	Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pendidikan Bappeda Kabupaten Sijunjung	48	S1
7	P	Kepala Sub Bidang Kesehatan, Sosial Pemerintah dan Kependudukan Bappeda Kabupaten Sijunjung	37	S1
8	L	Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Sijunjung	45	S1

Sedangkan pada kegiatan FGD anggota kelompok terdiri dari unsur nagari, pokja nagari, bidan desa dan kader yang ikut terlibat dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.

Peran dan Fungsi Kelembagaan

Kelembagaan kesehatan merupakan suatu wadah atau tempat yang biasanya disebut sebagai suatu organisasi yang mengurus permasalahan

kesehatan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mewujudkan Kabupaten Sijunjung Sehat dan Mandiri, baik itu kelembagaan yang bersifat pemerintahan atau formal maupun yang bersifat



non pemerintahan atau non formal. Kelembagaan masyarakat yang menangani permasalahan sanitasi di tingkat kabupaten adalah Forum Kabupaten Sijunjung Sehat (FKSS), Forum Multi Stakeholder (FMS) dan Badan Pengelola Sarana Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa telah ada kelembagaan di tengah masyarakat yang biasa diantaranya dikenal dengan istilah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan

Perwakilan Nagari (BPN) serta kelompok kerja (Pokja) nagari yang membuktikan bahwa masyarakat telah memiliki suatu kelembagaan yang akan mengurus permasalahan di nagari dan akan bermitra dengan pemerintahan nagari dalam memberdayakan masyarakat nagari. Pada Tabel 2 disajikan matrik hasil triangulasi mengenai definisi kelembagaan yang dilihat berdasarkan wawancara mendalam, Telaah dokumen dan observasi:

Tabel 2. Matrik Triangulasi Definisi Kelembagaan Kesehatan di Kabupaten Sijunjung

Topik	Dokumen	Observasi	Wawancara	Kesimpulan
Definisi Kelembagaan Kesehatan	Adanya peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan mengenai keberadaan kelembagaan kesehatan di daerah.	Adanya kelembagaan-kelembagaan di tengah masyarakat, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.	Sudah ada kesamaan pandangan dan pengertian mengenai kelembagaan kesehatan	Sudah adanya kelembagaan di masyarakat Kabupaten Sijunjung

Kebijakan mengenai kelembagaan yang mengurus permasalahan kesehatan ini khususnya dalam Forum Kabupaten Sehat di wilayah Kabupaten Sijunjung pelaksanaannya merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Sijunjung Sehat dan Mandiri.

Kebijakan mengenai Forum Kabupaten Sehat tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri

Kesehatan No.34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Permenkes RI, 2005).

Berikut ini disajikan matrik yang merupakan reduksi dari hasil wawancara mendalam mengenai kebijakan kelembagaan kesehatan yang berada di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 3berikut ini.



Tabel 3. Matrik Triangulasi tentang Kebijakan Kelembagaan Kesehatan.

Topik	Dokumen	Observasi	Wawancara	Kesimpulan
Kebijakan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan SK lembaga dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Nagari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sebagai pedoman kerja Forum. Adanya Sk Bupati ditingkat Kabupaten, SK Camat di tingkat Kecamatan dan Sk Nagari di tingkat kenagarian Sijunjung. 	Kebijakan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	Kebijakan penyelenggaraan Forum Kabupaten Sehat di wilayah Kabupaten Sijunjung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan, penganggaran dana dalam kegiatan lembaga terutama Forum Kabupaten Sehat dan Asosiasi BPSPAMs Kabupaten Sijunjung bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung. Jika terdapat kekurangan dana dapat diusulkan penambahan pada perubahan anggaran dengan syarat kegiatannya harus jelas

dan menguntungkan untuk masyarakat. Dari hasil diskusi kelompok yang dilakukan di tingkat nagari di ketahui bahwa belum adanya penganggaran dana untuk kegiatan pokja nagari. Berikut disajikan pada Tabel 4. matrik triangulasi mengenai anggaran pendanaan lembaga yang dilihat berdasarkan wawancara mendalam, FGD dan observasi.

Tabel 4. Matrik Triangulasi tentang Penganggaran Dana Kelembagaan Kesehatan.

Topik	Wawancara	FGD	Dokumen	Observasi	Kesimpulan
Penyuluhan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan penyuluhan dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan oleh forum.	Kegiatan penyuluhan belum rutin dilakukan di masyarakat	Adanya materi penyuluhan, absensi dan foto dokumentasi kegiatan penyuluhan.	Forum bertugas memediasi kegiatan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh Dinkes di kabupaten.	Kegiatan penyuluhan telah dilakukan, namun belum rutin kepada seluruh masyarakat.

Peranan Kelembagaan dengan Pendekatan Kemitraan

Kelembagaan dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat memperhatikan perannya dalam menjalin hubungan kemitraan. Persamaan persepsi baik itu dalam kelembagaan itu sendiri

maupun dengan unsur lainnya berpengaruh terhadap keberadaan lembaga itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan informan di kabupaten didapatkan kesimpulan bahwa telah terbentuk persamaan persepsi yang baik mengenai kelembagaan antara lembaga pemerintahan dengan



non pemerintahan di tingkat kabupaten.

Dari hasil FGD yang dilakukan di tingkat nagari didapatkan kesimpulan bahwasan menyamakan persepsi di masyarakat masih sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam permasalahan kesehatan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga membutuhkan proses yang lama (Wibowo, 2013).

Persamaan Persepsi Dalam Unsur Kemitraan

Dalam kenyataannya masyarakat dapat melihat pada sesuatu yang sama namun merasakan

hal yang berbeda. Ada beberapa faktor yang membentuk dan mempengaruhi persepsi tersebut. Menurut Robbins dan Judge (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibentuk oleh (1) orang yang memberikan persepsi, (2) target, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, dan (3) situasi, keadaan pada saat persepsi dilakukan (Wibowo, 2013). Untuk membandingkan hasil wawancara, FGD dan observasi dilakukan triangulasi tentang persamaan persepsi dari berbagai sumber yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 5. Matrik Triangulasi tentang Persamaan Persepsi pada Kelembagaan

Topik	Wawancara	FGD	Dokumen	Observasi	Kesimpulan
Persamaan Persepsi Penyelenggaraan Kelembagaan	Sudah terbentuk suatu persamaan persepsi yang sama mengenai kelembagaan antara lembaga pemerintahan dengan non pemerintahan di tingkat Kabupaten.	Menyamakan persepsi di masyarakat masih sulit untuk dilakukan	Adanya beberapa kesepakatan bersama atau MoU antara pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan masyarakat.	Persamaan persepsi antara forum dengan pemerintahan ada yang baik dan ada yang kurang baik	Tidak semua proses persamaan persepsi berjalan dengan baik

Komunikasi Intensif dalam Unsur Kemitraan

Komunikasi yang intensif baik itu antar pengurus dalam suatu lembaga atau organisasi, maupun antara lembaga pemerintah dengan non pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kemitraan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa komunikasi yang intensif sudah terbangun dengan baik di kelembagaan tingkat kabupaten.

Dari hasil FGD di nagari komunikasi yang terjalin baik antar kelembagaan maupun dengan masyarakat masih kurang intensif karena komunikasi yang terjalin di nagari lebih banyak menggunakan alat komunikasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi adalah kata-kata yang disampaikan melalui suara, bahasa tubuh dan ekspresi wajah, sehingga pesan yang diterima dan diinterpretasikan dengan baik dari *sender* kepada *receiver* (Wibowo, 2013). Berikut disajikan pada Tabel 6 matrik triangulasi tentang komunikasi pada kelembagaan.



Tabel 6. Matrik Triangulasi tentang Komunikasi Intensif pada Kelembagaan

Topik	Wawancara	FGD	Dokumen	Observasi	Kesimpulan
Komunikasi Intensif dalam Unsur Kemitraan	Hubungan komunikasi yang terbangun sudah intensif di kelembagaan yang ada di tingkat Kabupaten.	Komunikasi masih kurang intensif di tingkat kenagararian.	Adanya absensi dan foto kegiatan rapat yang dilakukan di kabupaten.	Komunikasi yang intensif cukup baik antara lembaga pemerintahan dengan lembaga masyarakat	Komunikasi di tingkat kabupaten sudah cukup bagus, namun yang menjadi kendala adalah komunikasi di tingkat nagari.

Pengaturan Peran dalam Unsur Kemitraan

Dalam membangun kemitraan suatu lembaga harusnya memiliki pengaturan peran yang jelas, sesuai dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tidak akan tumpang tindih. Pengaturan peran dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan di kabupaten telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Sedangkan dari hasil FGD di nagari pengaturan

peran masih kurang jelas karena belum adanya pembagian tugas yang jelas sehingga yang melaksanakan tugas hanya beberapa orang saja. Pada Tabel 7 ini disajikan matrik triangulasi mengenai pembagian peran pada lembaga kesehatan di masyarakat yang dilihat berdasarkan hasil wawancara mendalam, FGD dan observasi:

Tabel 7. Matrik Triangulasi tentang Pembagian Peran Dalam Unsur Kemitraan Kelembagaan Kesehatan di Kabupaten Sijunjung

Topik	Wawancara	FGD	Dokumen	Observasi	Kesimpulan
Pengaturan Peran dalam Unsur Kemitraan	Pengaturan peran dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.	Pegaturan peran di nagari masih belum jelas.	Adanya struktur organisasi dan pembagian tatanan atau tanggung jawab masing-masing di tingkat kabupaten	Masih ada pokja yang belum mengerti mengenai peran dan fungsinya didalam pokja	Pengaturan peran di tingkat kabupaten telah berjalan, namun di tingkat nagari pengaturan peran masih belum jelas.

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan peran kelembagaan kesehatan sebagai mediator di masyarakat, dibutuhkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan pemerintahan dan masyarakat. Tahapan

proses pendekatan kabupaten/kota sehat adalah dengan membentuk forum kabupaten sehat, dimana keanggotaan forum terdiri dari seluruh wakil masyarakat, pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, mas media dan lain-



lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat (Permenkesmendagri, 2005).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hapsari (2007) dimana kebijakan yang dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan kota sehat di Kota Balikpapan adalah adanya dukungan berkesinambungan dari setiap pergantian Walikota di Balikpapan. Hal ini menyebabkan tidak terputusnya tatanan dalam membentuk kota sehat.

Persamaan Persepsi dalam Pendekatan Kemitraan

Hasil wawancara mendalam dengan informan tentang persamaan persepsi dalam menjalankan suatu organisasi atau kelembagaan adalah suatu bentuk komunikasi dan hubungan yang baik dalam menyatukan atau mengkombinasikan antara pendapat, peran dan tugas pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kabupaten Sijunjung persamaan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam program kesehatan telah terbentuk dengan baik sehingga setiap orang yang terlibat telah memahami tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan dan program yang dilaksanakan (Yuhendri, 2011)

Dalam kenyataannya masyarakat dapat melihat pada sesuatu yang sama namun merasakan hal yang berbeda. Ada beberapa faktor yang membentuk dan mempengaruhi persepsi tersebut. Menurut Robbins dan Judge (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibentuk oleh (1) orang yang memberikan persepsi, (2) target, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, dan (3)

situasi, keadaan pada saat persepsi dilakukan (Wibowo, 2013).

Oleh karena itu hasil dari penelitian ini sesuai dengan Hapsari (2007) dan Wibowo (2013) dimana untuk menyamakan persepsi di masyarakat tergantung dari informasi yang diterima serta target yang menjadi sasaran. Masyarakat sebagai sasaran utama dalam permasalahan kesehatan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga membutuhkan proses yang lama.

Komunikasi Intensif dalam Pendekatan Kemitraan

Colquitt, LePine, dan Wesson (2011) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi adalah menginterpretasikan pesan, suara, kesempurnaan informasi dan struktur jaringan informasi. Dalam menginterpretasikan pesan ini bisa menjadi sumber masalah komunikasi, karena si pengirim informasi memiliki kekurangan kompetensi dalam berkomunikasi maupun si penerima informasi tidak terampil dalam menyimak sehingga salah menginterpretasikan pesan. Faktor kedua yaitu suara, dimana suara dapat mengganggu dalam penyampaian pesan dari sender kepada receiver (Wibowo, 2013).

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa di tingkat nagari komunikasi langsung secara tatap muka melalui rapat atau pertemuan masih kurang dilaksanakan sehingga komunikasi yang terjalin hanya melalui alat komunikasi/telfon, hal ini akan berpengaruh dalam menginterpretasikan informasi yang diterima oleh seseorang. Komunikasi yang terjalin intensif, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga



kemasyarakatan akan menghasilkan suatu ide-ide kreatif untuk meningkatkan akses sanitasi di masyarakat. Seperti mengadakan kegiatan arisan jamban bagi masyarakat sehingga akan memudahkan masyarakat dalam permasalahan keuangan dalam pembangunan jamban keluarga. (Tim Kajian Kesehatan dan Gizi, 2014)

Pengaturan Pesan

Dalam pelaksanaan meningkatkan akses sanitasi di Kabupaten Sijunjung juga memiliki Asosiasi BPSPAMs dan dalam pelaksanaannya Asosiasi BPSPAMs ini merupakan bagian dari forum kabupaten sehat, dimana ketua Asosiasi BPSPAMs merupakan anggota dari kepengurusan forum kabupaten sehat. Menurut kepala Dinas Kesehatan hal ini sengaja di rancang agar dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih tidak tumpang tindih. Selain itu adanya keterlibatan mantan pejabat pemerintahan dalam kepengurusan forum kabupaten sehat ini juga akan mempermudah dalam menjalin kemitraan. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di tingkat nagari pembagian peran di pokja nagari sehat masih belum jelas karena belum adanya pembagian tugas dari nagari, sehingga yang melaksanakan tugas hanya beberapa orang saja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsari (2007) dimana dengan adanya keterlibatan mantan pejabat daerah dalam suatu forum masyarakat maka pelaksanaan dari kegiatan forum akan lebih mudah seperti di Kota Balikpapan, mantan sekda terlibat langsung sebagai

anggota dalam forkohat (forum kota sehat) yang ada di Kota Balikpapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kegiatan kelembagaan sanitasi dalam pengembangan kegiatan perdesaan sehat di kabupaten Sijunjung yang di lihat dari unsur kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin kemitraan di kabupaten yang dilihat dari aspek persamaan persepsi, komunikasi dan pengaturan peran telah terbentuk dengan baik, namun di tingkat nagari kemitraan tersebut belum terjalin.

Untuk memperbaiki sistem kelembagaan sebaiknya pemerintah nagari menjalin kemitraan dengan lembaga yang telah ada di nagari seperti LPM, KAN, serta kegiatan-kegiatan UKBM dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sanitasi yang bersifat pemberdayaan masyarakat secara rutin dan berkala di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten sebaiknya lebih mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintahan maupun swasta lainnya serta perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan sanitasi di Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia 2010*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sijunjung. 2011. *Rencana Aksi Daerah PDT Sijunjung*. Sijunjung

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). 2004. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sijunjung. 2014. *Laporan Tahunan Program Kesling Dinas Kesehatan Sijunjung*.

Hapsari, D. 2007. *Gambaran Kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat Pada Lima Kota di Indonesia*. Media Litbang Kesehatan Volume XVII No. 3. Jakarta

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (KPDT RI). 2013. *Peraturan Menteri No.1 Tahun 2013*. Jakarta

Notoatmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni Edisi Revisi* PT. Rineka Cipta. Jakarta

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI. 2005. Nomor 34 tahun 2005 Tentang *Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2005. Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pendampingan Desa*.

Siregar, T.J. 2010. *Kepedulian Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjung Balai Karimun*. Universitas Diponegoro. Semarang

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta. Bandung

Susiyanto, D. 2012. *Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal*. Universitas Indonesia. Depok

Syahyuti. 2007. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih*

Operasional. Diakses Tanggal 28 Februari 2015 dari web; <http://websyahyuti.blogspot.com/2007/08/kelembagaan-dan-lembaga-dalam.html>.

Tim Peneliti Pusat Kajian Kesehatan dan Gizi. 2014. *Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nagari/Desa Dalam Kerangka Pembangunan Perdesaaan Sehat di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas. Padang

Wibowo. 2013. *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Management Studio and Clinic. Jakarta

Yulhendri. 2011. *Faktor Pembentuk Mutu Modal Manusia, Modal Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Keluarga*. Program Studi Pendidikan dan Ekonomi Universitas Negeri Malang.